

## RIWAYAT HIDUP



**Fadhil Amir**, lahir di Kota Makassar pada tanggal 1 Agustus 1997. Anak Kedua dari pasangan Ayah Muh Amir Zen Alhabsyi dan Ibu Fatma Salim Alatas. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Impres Bertingkat Mamajang III tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Pesantren Immim Putra Makassar hingga tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas PGRI I Makassar dengan mengambil program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan judul **“Tahapan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE) Di Kota Makassar”**.

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0170/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 24 November 2021.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



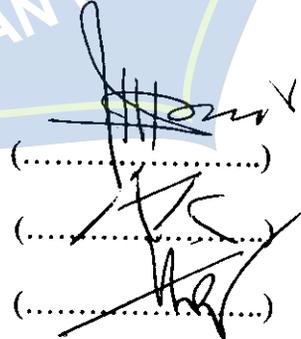
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM : 730720



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si  
NBM : 1084366

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, M.Si (Ketua)
2. Abdul Kadir Adys, SH., MM
3. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM



(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fadhil Amir

Nomor Stambuk : 105640223515

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 Februari 2021

Yang Menyatakan,



**Fadhil Amir**

## ABSTRAK

### **Fadhil Amir 2021. Tahapan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar (Dibimbing oleh: Rudi Hardi dan Nur Khaerah)**

Tujuan penelitian untuk melihat tahapan pemberdayaan dan pembinaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi pada aspek peningkatan peran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dalam melihat tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar. Melalui wawancara dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Adapun jumlah informan sebanyak 10 orang terdiri dari staf Dinas Sosial Kota Makassar, Camat Mamajang, lembaga swadaya masyarakat, peserta pemberdayaan WRSE dan masyarakat umum.

Hasil penelitian menunjukkan 7 indikator dalam mengukur tahapan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar dengan pembahasan sebagai berikut: pertama, Persiapan, pada tahap ini Dinas Sosial Kota Makassar berfokus mencari dan membentuk tenaga lapangan yang akan berfungsi sebagai pelaksana program pemberdayaan. Kedua, pengkajian, dinas sosial mengambil data lapangan terkait jumlah masyarakat yang masuk kategori WRSE dan merumuskan program penanganan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Ketiga, perencanaan alternative program. dengan melibatkan pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan dan juga lembaga swadaya masyarakat melakukan diskusi terkait langkah dalam membentuk program terhadap kelompok wanita rawan sosial di Kota Makassar Keempat, pemformalisasi kegiatan pemberdayaan WRSE berjalan sesuai dengan aturan Perwali No 10 Tahun 2015 tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Kelima, pelaksanaan, dimana dalam implementasi program WRSE di Kota Makassar belum berjalan maksimal karena berbagai alasan seperti kurangnya anggaran, data WRSE yang belum lengkap dan masalah pandemic Covid-19. Keenam, evaluasi, pada tahap ini menegaskan bahwa program WRSE di Kota Makassar belum terlaksana sesuai dengan rancangan program karena berbagai kendala. Dinas Sosial akan memperbaiki kekurangan termasuk dalam penambahan jumlah anggaran program. Ketujuh terminasi. Dinas Sosial kota Makassar dalam pelaksanaan pemberdayaan WRSE belum sampai pada tahap ini, kegiatan pemberdayaan akan berakhir namun program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus berlanjut dengan bentuk program yang berbeda namun tetap berkesinambungan. Dengan faktor pendukung motivasi dan kerjasama serta faktor penghambat kurangnya anggaran dan situasi Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Tahapan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul Tahapan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar

Skripsi ini merupakan pengantar sebagai penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP, M.IP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga proposal ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr.Nuryanti Mustari S.IP. M. Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis

selama menempuh perkuliahan.

5. Kepada kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. seluruh teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Februari 2021

Penulis,



**Fadhil Amir**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Penerimaan Tim</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	<b>iv</b>
<b>Abstak</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	9
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	9
2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	13
3. Unsur Pokok Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	14
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	16
5. Model Pemberdayaan Masyarakat.....	17
6. Tahapan Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	19
7. Faktor Pemberdayaan Masyarakat.....	22
C. Indikator Kesejahteraan Sosial.....	24
D. Konsep Pemberdayaan Wanita Rawa <sup>+</sup> Sosial Ekonomi (WRSE).....	28
E. Kerangka Pikir.....	29
F. Fokus Penelitian.....	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34

C.	Sumber Data.....	35
D.	Informan Penelitian.....	35
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
F.	Teknik Analisa Data.....	37
G.	Pengabsahan Data .....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	40
B.	Tahapan Proses Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Di Kota Makassar .....	51
1.	Tahapan Persiapan.....	52
2.	Tahapan Pengkajian.....	56
3.	Tahapan Perencanaan Alternative Program .....	60
4.	Tahapan Pemformalisasi.....	65
5.	Tahapan Pelaksanaan.....	69
6.	Tahapan Evaluasi.....	73
7.	Tahapan Terminasi.....	77
C.	Faktor Yang Melatarbelakangi Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Makassar .....	81
1.	Faktor Pendukung.....	81
2.	Faktor Penghambat.....	86
<b>BAB V. PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	92
B.	Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>95</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Fahrudin (2012), adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti: *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan

hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang jumlah angka kemiskinannya cukup besar. Terakhir, di tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 66,224 jiwa. Sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, maka lembaga pemberdayaan masyarakat dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar. Perda ini sebagai instrument, dasar hukum dan pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	2019	
		Jumlah Penduduk Kota Makassar	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Mariso	30.609	29.890
2	Mamajang	30.129	31.323
3	Tamalate	102.128	103.413
4	Rappocini	82.162	87.959
5	Makassar	42.553	42.962
6	Ujung Pandang	13.716	153.338
7	Wajo	15.470	15.983
8	Bontoala	27.886	29.311
9	Ujung Tanah	18.037	17.497
10	Sangkarang	7.239	7.929
11	Tallo	70.303	70.027
12	Panakuk kang	73.973	75.693
13	Manggala	75.094	74.393
14	Biringkanaya	110.138	110.318
15	Tamalanrea	56.553	59.310
16	Kota Makassar	775.968	770.709

Sumber : (BPS Kota Makassar 2020).

Semakin pesatnya pertumbuhan populasi masyarakat di Makassar merupakan salah satu faktor yang harus di perhatikan pemerintah kota Makassar dalam mencari solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga ke level terendah, sehingga masalah kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang mustahil untuk diuntaskan.

Dinas Sosial yang merupakan *leading sector* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dituntut untuk kreatif dalam memberikan program-program pemberdayaan masyarakat kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang belum memenuhi indikator sejahtera.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar diantaranya Program Donasi Sosial, Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Seperti program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan, bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat.

Tujuan pemberdayaan dan pembinaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi adalah meningkatnya peran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama kemampuan dalam mengatasi permasalahan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik, psikis maupun sosial. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peran sebagai isteri atau sebagai kepala keluarga dan atau sebagai anggota masyarakat, sehingga fungsi sosialnya berjalan secara maksimal.

Meningkatnya ketahanan sosial ekonomi dalam menangkal dampak negatif arus informasi dan mencegah serta menanggulangi terjadinya

masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi secara mandiri, sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan fungsi pencegahan, timbulnya kemiskinan.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus pada program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar di Kecamatan Mamajang dengan pertimbangan karena perempuan yang telah berusia 18-59 tahun yang menjadi kepala keluarga tanpa memiliki mata pencaharian tetap dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Seiring dengan fokus permasalahan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul Tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial Kota Makassar.

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tahapan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar?
2. Faktor yang mempengaruhi Tahapan proses pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tahapan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor yang melatarbelakangi proses pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar?

#### **D. Manfaat penulisan**

1. Manfaat praktis
  - a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di kota Makassar.
  - b. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar.
2. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
  - b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian;

- c. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun pengkajian terkait Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting dan berguna bagi sebuah penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, penelitian ini bukanlah pertama, sebelumnya sudah terdapat penelitian-penelitian yang sejenis. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dapat dihimpun oleh peneliti:

1. Theresia Ngutra (2017). Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar (*The Fullfilment Of Social Welfare Right To Poor Societies In Makassar City*). Penelitian menunjukkan bahwa program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum diterapkan secara merata. Hal tersebut terbukti, dimana masyarakat miskin ada yang belum mengenal program dan belum pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun.
2. Fakhmi Umar (2017). Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar adalah belum berperan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan program rehabilitasi yang belum berhasil, jaminan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada lansia terlantar tidak terpenuhi

serta penyaluran bantuan pemberdayaan sosial kepada lansia terlantar yang belum merata. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar.

3. Hilma Nurfaliami (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Lorong (Suatu Studi Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Dari hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor mempengaruhi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program BULO yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan tersebut adalah keterlibatan elemen pendukung dan ketersediaan sarana dan prasarana. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran pemerintah, tokoh masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mendukung Program BULO. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Program BULO yaitu pemerintah baik ditingkat kecamatan sampai RT dan jajaran SKPD terkait, perusahaan sebagai pihak CSR, dan masyarakat kelompok tani lorong (Poktanrong).

Dari beberapa penelitian diatas, semuanya melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat ataupun pemberdayaan ekonomi melalui sebuah program dari lembaga baik pemerintah maupun swasta di daerah tertentu. Namun beberapa penelitian diatas belum ada yang secara khusus membahas mengenai pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang dilakukan oleh lembaga

pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Makassar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu selain penelitian secara khusus membahas mengenai pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, lokasi penelitiannya pun berbeda, yaitu di Kecamatan Mamajang. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji mengenai Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Di Kota Makassar.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut (Widjajanti, 2011), dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya (Sarah & Waluyo, 2020),.

Pendekatan *bottom-up* untuk pembangunan pedesaan (didorong dari dalam, atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah alam, manusia dan budaya memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan pembangunan pedesaan *top-down* melihat tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik, bawah ke atas (Ras, 2013).

Pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model *bottom-up* terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll untuk mengubahkan di wilayah mereka (Rahardjo, 2010).

Pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Lodjo, 2013).

Gerakan sosial (Karman, 2015), terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai yang abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (*individual action*) dan aksi-aksi kolektif (*collective action*) sejak tahun 1960-an, yakni penelitian tentang perlawanan (*social resistance*), gerakan sosial (*social movement*) dan tindakan kolektif (*collective behavior*) berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut.

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan (Hubies, 2010).

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.

Pemberdayaan memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Indrajit, 2014).

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010)

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan kepada kumpulan masyarakat yang

berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

## **2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Terdapat 4 (empat) prinsip pemberdayaan masyarakat) diantaranya (Ilham, 2019):

### **a. Prinsip Kesetaraan**

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun wanita (Baidowi, 2011). Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar menagajar.

### **b. Prinsip Partisipasi**

Program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat (Taliziduhu, 2007). Namun agar sampai pada tingkatan tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang/disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, Walaupun di awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri (Abdoellah, 2016). Tetapi Perlahan-lahan tapi pasti, peran pendamping akan berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

d. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan yakni menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain (Yustika, 2007). Akan tetapi konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan *the have not*, Tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit *the have little*.

3. **Unsur Pokok dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok menurut, yaitu (Haqqie, 2016):

- a. Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru karenanya dengan: peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas. Contohnya: Masyarakat membutuhkan informasi yang komprehensif terutama tentang pemberdayaan lingkungan dimana nantinya masyarakat diharapkan mampu menjaga lingkungan sekitar agar sllu bersih dan nyaman untuk ditempati dan mengurangi angka kesakitan di masyarakat.

- b. Keterlibatan dan partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Contohnya: Dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan tidak hanya pemerintah setempat dan badan yang bekerja tetapi juga masyarakat harus ikut serta dalam setiap kegiatan agar masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan diharapkan masyarakat mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari.
- c. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Contohnya: Dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat diharapkan berkonsultasi dengan badan atau pemerintah setempat agar ada timbal balik antara badan, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisasi warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya: Badan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat atau menjalin komunikasi yang baik sehingga dalam mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lingkungan masyarakat mudah untuk diajak

bekerjasama sehingga setiap ada masalah dapat di selesaikan secara bersama-sama/musyawarah.

#### 4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Pemberdayaan Masyarakat ada empat, yaitu (Subiyanto, 2013):

##### a. *The Growth Strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekosistem, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan.

##### b. *The Welfare Strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam arti masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduksi dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang sedemikian inilah dakwah dengan model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.

c. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

d. *The Integrated or Holistic Strategy*

Untuk mengatasi delima pemberdayaan masyarakat karena kegagalan dari ketiga strategi yang dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif strategi pemberdayaan.

**5. Model Pemberdayaan Masyarakat**

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel model pemberdayaan masyarakat (Widjajanti, 2011):

a. Modal fisik (*physical capital*)

Modal fisik adalah fasilitas atau aset yang digunakan sebagai alat dan pendukung utama terselenggaranya suatu proses usaha atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan seperti gedung, jalan, alat-alat, mesin dan sebagainya. Modal fisik dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 6 indikator yaitu; sarana produksi pertanian; sarana dan prasarana pendidikan; sarana dan prasarana kesehatan; sarana dan prasarana ekonomi; sarana dan prasarana komunikasi dan; sarana dan prasarana transportasi.

b. Modal Manusia (*human capital*)

Modal Manusia adalah aset yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Modal manusia dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu; tingkat pendidikan; tingkat kesehatan dan; kemampuan membangun interaksi hubungan atau asosiasi antar sesama.

c. Modal Sosial (*social capital*)

Modal Sosial adalah suatu norma atau nilai yang telah dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial/kerja yang positif, dalam rangka tercapainya tujuan bersama untuk menciptakan nilai. Indikator yang digunakan dengan menggunakan 5 pertanyaan yaitu adanya; jaringan sosial atau kerja; tingkat kepercayaan antara sesama; ketaatan terhadap norma; kepedulian terhadap sesama dan; keterlibatan dalam aktivitas organisasi sosial

d. Kemampuan Pelaku Pemberdayaan

Kemampuan Pelaku Pemberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaku pemberdayaan yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat. Kemampuan pelaku pemberdayaan diukur melalui tiga aspek perilaku; pengetahuan atau kognitif; sikap atau afektif dan; ketrampilan atau psikomotorik.

e. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan

melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui; kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, ; perencanaan program, melaksanakan program serta; keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

f. **Keberdayaan Masyarakat**

Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek; kemampuan dalam pengambilan keputusan; kemandirian dan; kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

**6. Tahapan Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan menurut Soekanto dalam (Hadi, 2015) diantaranya:

- a. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha

mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis; terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah (Muslim, 2012):

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat

merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

- b. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

#### **7. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Masyarakat**

Ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, diantaranya (Azizah, 2015):

- a. Faktor Pendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Motivasi

Motivasi, dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan (Asnawi, 2012). Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak.

2) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia (Hayat, 2018).

b. Faktor Penghambat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

1) Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu (Adisaputro, 2010).

2) Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana

dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat (Barnawi, 2012).

### C. Indikator Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut (Haris, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal (Husna, 2014).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte, dalam (Suradi, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

2. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiriannya, upaya untuk memenuhi kemandirian penyandang disabilitas pihak lembaga yang terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah tersebut.

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, kesejahteraan sosial juga memiliki

beberapa komponen –komponen yang tidak kalah jauh penting. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara kesejahteraan sosial dengan kegiatan-kegiatan lainnya, komponen-komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain (Suradi, 2012):

1. Organisasi formal usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.
2. Pendanaan tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.
3. Tuntutan kebutuhan manusia, kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.
4. Profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya
5. Kebijakan, pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

6. Peran serta masyarakat usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran serta dari para penyandang disabilitas untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam mengikuti program peningkatan kapasitas diri ini untuk meningkatkan keterampilannya.
7. Data dan informasi kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Dalam kesejahteraan sosial selain berfokus pada keberfungsian sosial yang terjadi di masyarakat, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa bidang-bidang pelayanan dalam usaha kesejahteraan sosial. Tentunya hal ini lebih menspesifikasi fokus-fokus pelayanan yang terdapat dalam ilmu kesejahteraan sosial, fokus-fokus pelayanan dari beberapa cakupan yang terdapat dalam kesejahteraan sosial juga saling terkait erat antara satu dengan yang lainnya. Cakupan-cakupan tersebut antara lain terdiri dari (Triono, 2011):

1. kesejahteraan anak dan keluarga
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda
3. kesejahteraan orang lanjut usia
4. pelayanan kesejahteraan sosial umum
5. pelayanan rekreasi

6. pelayanan sosial koreksional
7. pelayanan kesehatan mental
8. pelayanan sosial medis
9. pelayanan sosial bagi penyandang cacat
10. pelayanan sosial bagi wanita
11. pelayanan sosial perumahan dan lingkungan

**D. Konsep Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)**

Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan; bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat. (Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1996). Pengertian PRSE awalnya dikenal dengan istilah Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah wanita berusia 18 – 59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kondisi dikatakan rawan sosial ekonomi karena tinggal dalam rumah tangga miskin dan sangat rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Istilah WRSE mengalami perkembangan definisi sesuai kondisi perubahan jaman. WRSE sebelumnya didefinisikan sebagai seorang wanita dewasa belum menikah

atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Purnama, 2019).

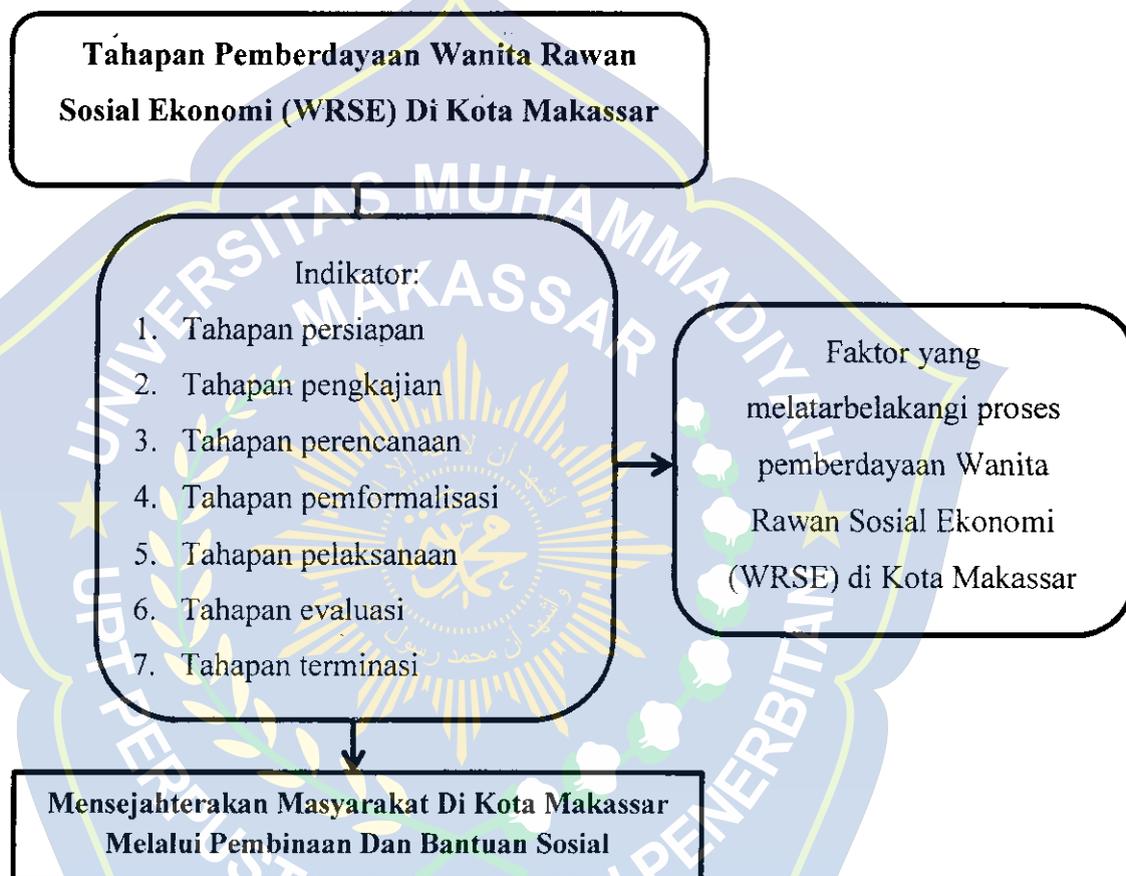
Konsep pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan), ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Agustinah, 2017) Selanjutnya, pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Lebih lanjut menurut (Putri & Darwis, 2015) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansi merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi merupakan pemberian kemampuan kepada PRSE agar dapat lebih berdaya melalui keterlibatan potensi yang ada diluar dirinya, dengan peningkatan pemahaman dan implemantasi bimbingan inovasi.

#### **E. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berjudul Tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial Kota Makassar, penelitian ini memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan menurut (Muslim, 2012) dalam

memberdayakan masyarakat khususnya bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

#### Bagan Kerangka Pikir



#### F. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang akan diajukan, maka penulis membuat penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut: tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, tahapan pemformalisasi, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan tahapan terminasi serta faktor pendukung juga faktor penghambat dalam mensejahterakan masyarakat di Kota Makassar melalui pembinaan dan bantuan sosial.

## G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Tahapan Persiapan pada tahapan ini memiliki beberapa tahapan yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota Makassar, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, dimana tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh tim lapangan, kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan sesuai keinginan mereka dan ketiga LSM juga turut berperan dalam memberikan masukan serta saran kepada pemerintah.
2. Tahapan pengkajian (*assessment*) dalam hal ini dinas Sosial Kota Makassar dapat mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran.
3. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan pada tahapan ini staf atau petugas lapangan Dinas Sosial Kota Makassar secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. Tahapan pemformalisasi rencana aksi pada tahapan ini para agen perubahan yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahapan pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kerja sama antar petugas lapangan dan masyarakat merupakan hal penting dalam

tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

6. Tahapan evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat Kota Makassar yang sedang berjalan dan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan kegiatan/proyek harus segera berhenti.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dengan melihat bentuk serta tahapan pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial dengan indikator yang telah dirumuskan penulis.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan karena jenis Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan pembinaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).
2. Data Sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar berupa catatan dan dokumen-dokumen berkaitan dengan penelitian.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian untuk memperoleh data berdasarkan kondisi yang diteliti, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Drs. M. Ihsan Idrus, M.m	IS	Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
2.	La Heru S.Sos, M.Si	LH	Kasi Jaminan Kesejahteraan Sosial
3.	Fadli Wellang	FW	Camat Mamajang
4.	Ahmad Narang	AN	Forum Komunikasi Motivator Pembangunan Kota Makassar
5.	Mukhtar Tahir	MT	Forum Peduli Sosial
6.	Julaeka	JL	Peserta WRSE
7.	Sumiati	SM	Peserta WRSE
8.	Hasriani Dg. Kontu	HK	Masyarakat
9.	Agus Tammang	AT	Masyarakat
10.	Syharuddin	SH	Masyarakat
	<b>Jumlah Total</b>	<b>10</b>	<b>Informan</b>

(Sumber: Diolah oleh penulis)

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

#### 1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap memberikan dukungan.

#### 2. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer dalam mendukung Pemberdayaan dan pembinaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). dengan Dinas Sosial Kota Makassar melalui secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan.

#### 3. Studi dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar dan buku-buku serta majalah. Beberapa data sekunder yang dicari dalam

penelitian ini adalah informasi tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang dianggap relevan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain (Rijali, 2019):

1. Catatan Fakta data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung.
2. Catatan Teori hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (variabel) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan.

3. Catatan metodologis pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. Isi masing-masing catatan ada dua: pertama catatan deskriptif berisi bagian utama, kedua catatan reflektif/memo berisi kritik terhadap catatan deskriptif.

#### **G. Pengabsahan Data**

Dalam Penelitian kualitatif, data bisa di katakan akurat ketika terjadi keselarasan antara yang di laporkan dengan apa yang perbedaan antara yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Untuk menguji kebenaran informasi pada metodologi ini dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut Widjaja (2013) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

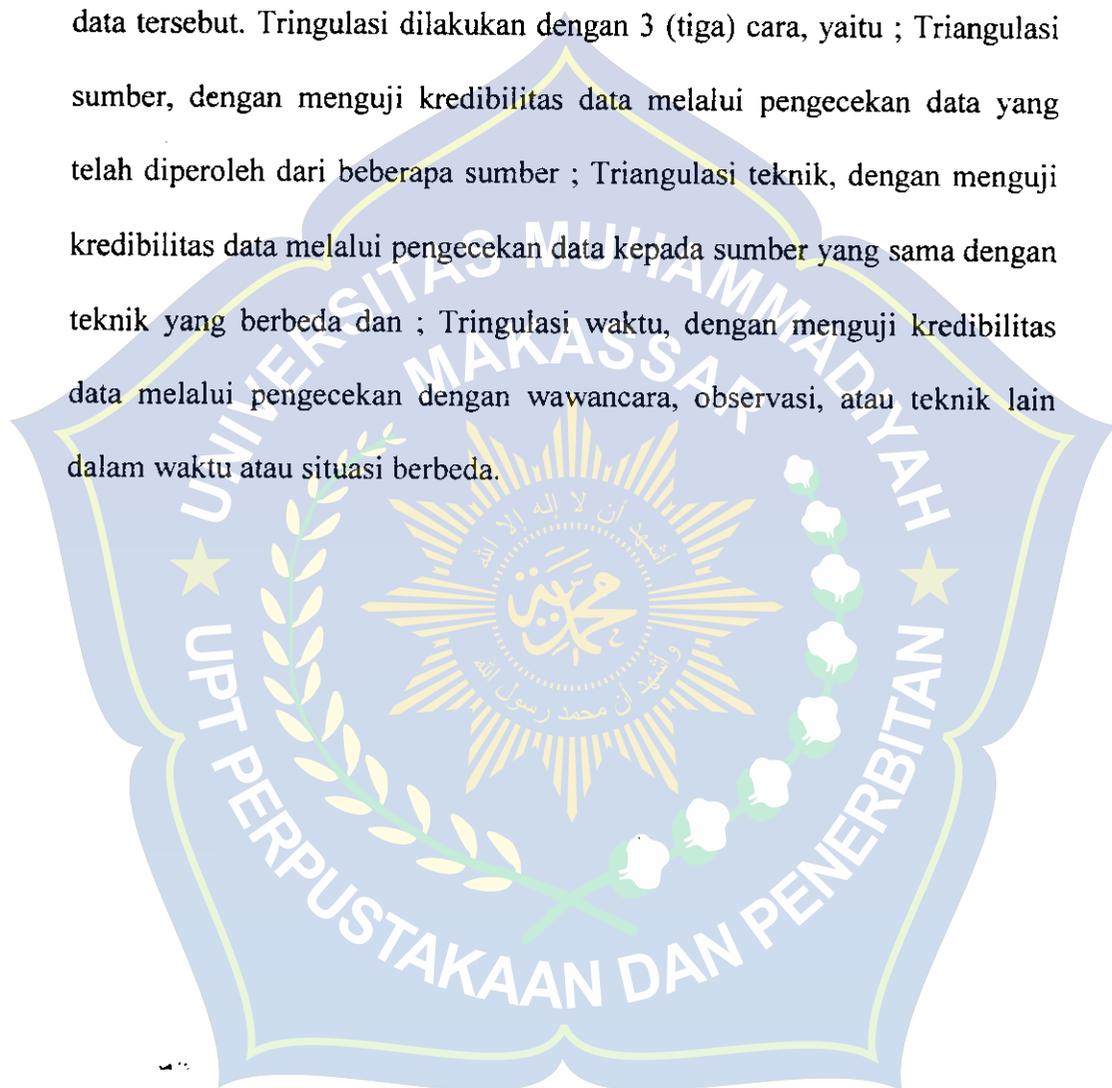
Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancara kembali sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali dan mendapatkan informasi yang tepat.

2. Peningkatan ketekunan peneliti

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu ; Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber ; Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan ; Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Wilayah Kota Makassar

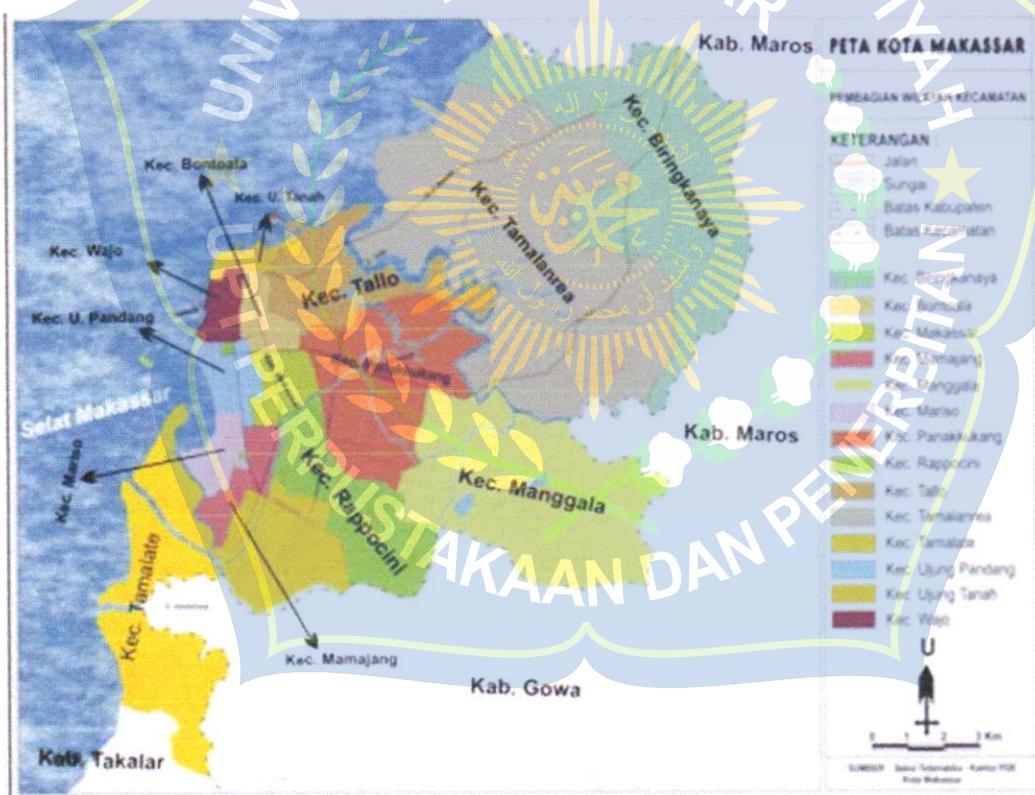
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada dikoordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Kecamatan

yang memiliki wilayah terbesar yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 48,22 km<sup>2</sup> , atau 27,43%, sedangkan untuk wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 60 km<sup>2</sup> , atau 1,04%.

Kota Makassar sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Berikut gambar 4.1 peta kota Makassar :

Gambar 4.1 Peta Kota Makassar



(Sumber : <http://makassarkota.go.id>)

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.

- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

## **2. Dinas Sosial Kota Makassar**

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudiar berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota

Makassar, berada pada tanah seluas 499m<sup>2</sup>, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Visi: Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014

Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial Sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat

2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
4. Melakukan jaminan sosial
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang berpartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakehoders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris

- a) Sub Bagian Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Perlengkapan
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
  - a) Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
  - b) Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - c) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - a) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
  - b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
  - c) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.
- e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
  - a) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
  - b) Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
  - c) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
- f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial
  - a) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
  - b) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
  - c) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar.

**3. Arah Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan, bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat.. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah wanita berusia 18 – 59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS). Kondisi dikatakan rawan sosial ekonomi karena tinggal dalam rumah tangga miskin dan sangat rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Istilah WRSE mengalami perkembangan definisi sesuai kondisi perubahan jaman. WRSE sebelumnya didefinisikan sebagai seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1996).

Tujuan Kegiatan ini untuk mengurangi jumlah WRSE yang berada dalam garis kemiskinan juga meningkatkan taraf hidup WRSE, selain itu juga mengembangkan keterampilan WRSE untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di lingkungannya, khususnya masalah WRSE. Pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar dilakukan dengan maksud:

- a. Memberi kemampuan sasaran pemberdayaan dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan setiap bentuk peluang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
- b. Meningkatkan kemampuan, fungsi, dan peran sosial perempuan rawan sosial ekonomi dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pengetahuan.
- c. Menumbuhkan kemandirian dalam mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi secara optimal.

Adapun tujuan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah:

- a. Meningkatnya peran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama kemampuan dalam mengatasi permasalahan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik, psikis maupun sosial.
- b. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peran sebagai isteri atau sebagai kepala keluarga dan atau sebagai anggota masyarakat, sehingga fungsi sosialnya berjalan secara maksimal
- c. Meningkatnya ketahanan sosial ekonomi dalam menangkal dampak negatif arus informasi dan mencegah serta menanggulangi terjadinya masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi secara mandiri, sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan fungsi pencegahan, timbulnya kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah mendasar karena menyangkut kehidupan dan penghidupan penduduk. Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan, terisolir, minimnya akses (pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sarana dan prasarana lingkungan, tempat tinggal), dan kerentanan. Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap masalah-masalah sosial di Indonesia. Berbagai kesenjangan terjadi antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Akibatnya, muncul berbagai masalah kesejahteraan, termasuk wanita rawan sosial ekonomi. Adapun persentase keluarga fakir miskin berdasarkan kecamatan di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Keluarga Fakir Miskin di Kota Makassar

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Masyarakat	Keluarga Fakir Miskin
1.	Biringkanaya	41,165	5206
2.	Tamalanrea	14,528	3279
3.	Manggala	30,473	5750
4.	Panakukang	38,167	8259
5.	Rappocini	30,171	5632
6.	Makassar	30,826	7838
7.	Ujung Pandang	4,667	1050
8.	Wajo	5,913	825
9.	Bontoala	16,763	3010
10.	Tallo	48,246	11211
11.	Ujung Tanah	17,213	3778
12.	Mariso	21,159	5639
13.	Mamajang	14,156	2525
14.	Tamalate	55,624	7427
15.	Sangkarrang	9.701	2,525

(Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar)

Memperhatikan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa tiga kecamatan yang memiliki jumlah keluarga fakir miskin terbanyak adalah kecamatan Mariso, kecamatan Makassar, dan kecamatan Tallo. Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk mengambil dinas sosial sebagai lokasi penelitian untuk melihat pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin yakni program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar.

Kemampuan perempuan untuk memainkan peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu rumah tangga/tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah (tuntutan kebutuhan ekonomi) keluarga menjadi nyata bagi

kaum perempuan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada kalangan masyarakat modern. Kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal tanpa kepemilikan kemampuan untuk memainkan peran ganda kepala keluarga atau orang tua tunggal (*single parent*) atau janda akan mengalami hambatan dan memenuhi berbagai bentuk kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi apabila tidak mendapat pemberdayaan.

Adapun masyarakat yang terdaftar sebagai wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dilihat dari tabel berikut:



Tabel 4.2 Daftar Peserta WRSE Kota Makassar

No.	Nama	Alamat
1.	Hj. Lala	Kelurahan Bira, Tamalanrea
2.	Sumini	Bara-Baraya Timur, Makassar
3.	Rohani	Bara-Baraya Timur, Makassar
4.	Hamline	Ujung Pandang Baru, Tallo
5.	Muliati	Maccini Sombala, Tamalate
6.	Sumiati	Bajik Mappakasunggu, Mamajang
7.	Rahmatia	Bunga ejaya, Bontoala
8.	Salmiyah	Bulurokeng, Biringkanaya
9.	Diana R.	Tabaringan, Ujung Tanah
10.	Hasna	Tabaringan, Ujung Tanah
11.	Sari	Maccini Sombala, Tamalate
12.	Kamaria	Kampung Buyang, Mariso
13.	Herlina	Kampung Buyang, Mariso
14.	Rosmiati Dg. Caya	Kelurahan Manggala, Manggala
15.	Ati	Kelurahan Manggala, Manggala
16.	Hasriaty	Tamamaung, Panakkukang
17.	Narmawati	Karunrung, Rappocini
18.	Rahmawati Dg. Tene	Karunrung, Rappocini
19.	Sakariah	Kel. Biringkanaya, Biringkanaya
20.	Rasbiah	Pampang, Panakukang
21.	Farida	Sawerigading, Ujung Pandang
22.	Subea	Mangkura, Ujung Pandang
23.	St Hasniah	Parang Layang, Bontoala
24.	Masita	Kelurahan Bira, Tamalanrea
25.	Mariam	Kelurahan Bira, Tamalanrea
26.	Kebo	Kodingareng, Sangkarang
27.	Dawiah	Ma'imongan Tua, Wajo
28.	Marini	Malimongan Tua, Wajo
29.	Julaeka	Baji Mappakasunggu, Mamajang
30.	St. Hasna	Butung, Wajo

(Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar)

## **B. Tahapan Proses Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Di Kota Makassar**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Seperti program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan, bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat.

Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat tahapan pelaksanaan program menggunakan indikator pemberdayaan yang meliputi tahapan persiapan, tahapan

pengkajian, tahapan perencanaan, tahap pemformalisasi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi dengan pembahasan sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

Persiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu. Kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional

Persiapan yang terlebih dahulu dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar dengan mengecek sejauh mana kesiapan tenaga lapangan dalam mempersiapkan bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan. Pada tahapan tersebut di atur sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar termasuk melakukan diskusi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program tersebut.

“Ada banyak persiapan yang tentunya harus dilakukan terutama menyediakan tenaga lapangan kami yang nantinya bertugas untuk melakukan pemberdayaan. Kebutuhan tenaga disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tenaga ini nantinya akan di bekali dengan edukasi sehingga apa yang menjadi sasaran pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang nanti ditetapkan.” (Wawancara dengan IS 01 Februari 2021).

Senada dengan hal tersebut kepala bidang usaha kesejahteraan sosial menambahkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam persiapan program.

“Selain mempersiapkan aparatur yang nantinya bertugas dilapangan kami juga senantiasa melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk

memberikan masukan dan kegiatan-kegiatan dalam program pemberdayaan. LSM yang sering terlibat sejauh ini seperti Forum Komunikasi Motivator Pembangunan Kota Makassar dan forum peduli sosial, ada juga dari organisasi yang lain tapi dua nama yang saya sebutkan merupakan yang paling sering terlibat.” (Wawancara dengan LH 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan pelaksanaan pemberdayaan terlebih dahulu menyiapkan kebutuhan tenaga operasional yang nantinya akan bekerja dilapangan dimana para aparatur tersebut juga di bekali dengan pengetahuan. Selanjutnya tahap persiapan juga pemerintah senantiasa membangun sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan masukan dan saran kegiatan dalam mendukung program.

Definisi dari pemberdayaan masyarakat, terkhususnya pada komunitas yang operasif ini merupakan suatu respon yang esensial untuk kemudian bisa atau dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi, politik bagi masyarakat yang terdapat didalam kehidupannya. Sehingga pemerintah perlu melakukan persiapan dalam rangka menyusun agenda dalam program.

Pemberdayaan masyarakat demi peningkatan ekonomi masyarakat mendapat dukungan dari camat Mamajang. Sementara proses perekrutan petugas lapangan diarahkan agar turut memberdayakan masyarakat yang ada termasuk di setiap kecamatan, dengan demikian para petugas dapat memahami struktur wilayah.

“Kami mendukung penuh upaya Dinas Sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat terlebih bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai penghasilan sementara perempuan-perempuan tersebut menjadi kepala keluarga. Untuk itu saya mendorong agar para petugas yang bekerja

dilapangan juga berasal dari kecamatan Mamajang. Karena merekalah yang memahami struktur wilayah dan mengetahui kondisi masyarakat. Selain itu memudahkan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan seperti kelengkapan administrasi kependudukan.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan Camat Mamajang berharap agar petugas lapangan yang ada berasal dari setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dengan demikian dapat memahami kondisi masyarakat sehingga proses pelaksanaan pemberdayaan nantinya dapat berjalan maksimal.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemberdayaan melalui persiapan yang matang dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat guna mendukung salah satu bentuk kegiatan peningkatan kompetensi dan merupakan bagian integral dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diperlukan pengelolaan secara efektif dan adanya koordinasi yang tepat diantara para pegawai atau panitia penyelenggara terhadap diklat yang diselenggarakan sehingga dapat menghasilkan SDM yang handal dan memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan.

Tahap perencanaan pemberdayaan tidak hanya mengarah kepada pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga mengarah kepada peningkatan potensi masyarakat. Hal tersebut tentu harus mendorong para agen pemberdayaan agar benar-benar di persiapkan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

“Pemerintah harus merubah pola pemberdayaan yang selama ini dilakukan dengan hanya memberi bantuan kepada masyarakat baik

berupa sembako atau dana tetapi tidak ada pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung menggunakan bantuan tersebut untuk arah yang lain dan pastinya bertentangan dengan esensi dari pemberdayaan itu sendiri. Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk benar-benar menggali potensi yang ada di masyarakat dan bagaimana kemudian pemerintah mengarahkan masyarakat menggunakan bantuan untuk kepentingan jangka panjang.” (Wawancara dengan AN 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan disimpulkan bahwa saran dari lembaga swadaya masyarakat agar pemerintah benar-benar mendorong para agen pemberdayaan di lapangan untuk mengarahkan masyarakat dalam meningkatkan potensi yang dimiliki.

Validitas penerima program urgen diketahui agar pemberian bantuan pemberdayaan dimaksud tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat sasaran. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima pemberdayaan agar sasaran atau penerima benar-benar orang yang berhak diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat sejatinya upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wanita rawan sosial di Kota Makassar mengarah kepada perempuan yang berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk kemudian di berdayakan secara finansial agar mampu meningkatkan perekonomian agar tercipta kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Namun masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan pemberdayaan cenderung tidak tepat sasaran dan justru sebaliknya masyarakat yang berkategori mampu mendapatkan bantuan pemerintah.

“Persoalan yang perlu di tangani pemerintah menurut saya sasaran dari pemberdayaan itu sendiri. Karena biasanya ada orang yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak dapat, namun ada yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Tentu bagi para pelaksana pemberdayaan dilapangan perlu memperhatikan hal tersebut. Terlebih

banyak kasus di temukan para pelaksana lebih memprioritaskan keluarga atau kenalan mereka di banding masyarakat yang benar-benar membutuhkan.” (Wawancara dengan AT 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan merupakan bentuk tanggapan masyarakat atas diskriminasi dari bentuk bantuan sebagai uapaya pemberdayaan yang cenderung tidak tepat sasaran dan tidak di tempatkan semestinya. Persoalan tersebut menjadi kritikan dari masyarakat agar segera di benahi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dalam rangka tahap perencanaan proses pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar berfokus kepada perekrutan tenaga lapangan yang akan menjalankan program pemberdayaan. Dimana dalam proses peyediaan tenaga tersebut di sesuaikan dengan jumlah wilayah dan para petugas di berikan bimbingan sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan dilapangan.

## **2. Tahapan Pengkajian**

Pengkajian adalah tahap awal dari proses pemberdayaan dan merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status sosial masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu melakukan observasi pada masyarakat untuk melakukan pendataan terkait potensi dan permasalahan yang ada di

masyarakat, kemudian mengacu dari pendataan tersebut dapat dirumuskan program pemberdayaan.

“Sebelum melakukan pemberdayaan bagi wanita rawan sosial ekonomi di Makassar tentu terlebih dahulu pihak kami melakukan pengkajian dilapangan terkait apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat agar dapat di kembangkan. Jadi program tidak asal di bentuk perlu dasar dalam membentuk sebuah program. Terlebih arah dari program ini benar-benar diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya kaum perempuan di Kota Makassar.” (Wawancara dengan LH 01 Februari 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan sebelum pelaksanaan pemberdayaan Dinas Sosial melakukan pengkajian dengan turun kemasyarakat dalam melihat apa yang menjadi kebutuhan dari kaum perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses pemberdayaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang masyarakat, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan masyarakat, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan.

Pendataan tentang kemampuan ekonomi masyarakat menjadi program yang dicanangkan oleh pemerintah Kecamatan Mamajang, dimana pendataan tersebut dilakukan guna memudahkan pemberian bantuan dari pemerintah dalam upaya melakukan kegiatan pemberdayaan.

“Pendataan tentang masyarakat miskin di Kecamatan Mamajang ini menjadi program rutin yang kami lakukan setiap 6 bulan sekali. Pendataan ini bertujuan memudahkan penentuan sasaran dalam program pemerintah seperti pemberian bantuan dan pemberdayaan. Adapun latar belakang mengapa mereka tidak berdaya kebanyakan karena kurangnya pengetahuan dalam melihat dan menggali potensi yang dimiliki, disinilah pentingnya hadir pemerintah untuk melakukan pelayanan publik.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan pada dasarnya pemerintah Kecamatan Mamajang telah memiliki data terkait masyarakat kurang mampu yang ada diwilayahnya, hal tersebut tentu mempermudah dinas sosial dalam mendeteksi target dan sasaran dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian permasalahan sosial pada sasaran pemberdayaan agar dapat menentukan arah pelaksanaan program pemberdayaan.

Melihat permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tidak mampu berdaya secara ekonomi merupakan langkah yang baik dalam mendorong program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar. Kelompok perempuan memang sering menjadi perbincangan atas ketidakmampuan mereka berdaya seperti kelompok laki-laki sehingga memicu emansipasi. Pada dasarnya perempuan sebenarnya memiliki sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh laki-laki.

“Tahap pengkajian ini saya pikir adalah pondasi awal yang sangat baik dalam menentukan arah program agar tidak asal terlaksana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upaya emansipasi perempuan sudah dari dulu menjadi isu hangat. Namun program-program yang mengarah kepada peningkatan SDM kelompok perempuan hanya sebatas sosialisasi tanpa ada aksi nyata yang dilakukan. Harapannya kemudian pemerintah dapat mengkaji bahwa banyak hal yang bisa dilakukan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara ekonomi. Hanya saja memang mereka tidak mengetahui, tidak mempunyai modal dan tidak memahami

strateginya, disinilah pentingnya kehadiran pemerintah untuk melakukan pemberdayaan.” (Wawancara dengan MT 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perempuan dapat menempati berbagai peran dalam struktur sosial yang ada dimasyarakat dalam upayanya meningkatkan taraf kehidupan. Kehadiran pemerintah tinggal mendorong strategi yang bisa menjadi acuan bagi perempuan agar mampu bersaing secara ekonomi.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Pemerintah sebagai agen pemberdayaan tentu perlu mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada melalui program pemberdayaan.

Mengkaji permasalahan masyarakat utamanya kaum perempuan dalam kelompok masyarakat tentu akan menemukan berbagai persoalan yang begitu kompleks. Permasalahan seorang wanita yang selalu dianggap tidak memiliki kekuatan fisik seperti laki-laki membuat pemerintah perlu memberikan ruang kepada kelompok wanita agar mampu berdaya secara ekonomi.

“Permasalahan terberat yang sebenarnya di hadapi oleh kami kaum perempuan adalah tidak mempunyai kemampuan bekerja seperti laki-laki, terlebih dari segi fisik. Perempuan hanya identik dengan kantoran dan asisten rumah tangga, kehadiran pemerintah dalam melihat potensi yang ada harus sesuai dengan program pemberdayaan. Misalnya pemerintah membentuk usaha konveksi dimana pekerjanya semua perempuan yang telah di berdayakan melalui program pemerintah. Tetapi saya melihat rata-rata hal tersebut sangat matang

pada wilayah pengkajian tetapi pelaksanaan dilapangan jauh dari rencana yang telah di tetapkan.” (Wawancara dengan JL 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa minimnya kepercayaan masyarakat utamanya kelompok perempuan dari segi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Dimana masyarakat beranggapan bahwa perencanaan pemberdayaan yang matang terkadang berbeda dengan fakta dilapangan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait tahap pengkajian dalam proses pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan melakukan pendataan terhadap kelompok perempuan yang akan di berdayakan secara ekonomi melalui penggalian potensi-potensi yang ada. Dinas Sosial tentu akan mudah merumuskan program jika permasalahan tersebut bersifat homogen atau sejenis sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya dalam proses penyelesaiannya. Tetapi yang terpenting proses pengkajian merupakan tahapan yang menentukan arah pelaksanaan program sehingga benar-benar dapat memberdayakan masyarakat utamanya kelompok perempuan, rawan sosial ekonomi di Kota Makassar.

### **3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program**

Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

Program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Makassar pada dasarnya telah melibatkan masyarakat dalam menyusun program yang akan dilaksanakan terkait kegiatan pemberdayaan. Permasalahan perempuan yang begitu kompleks serta tidak adanya sinergitas dinas sosial dengan sektor swasta membuat tidak semua keinginan dari masyarakat dapat terealisasi dalam waktu singkat.

“Untuk program dalam pemberdayaan sendiri sebenarnya pemerintah kota Makassar telah melibatkan peran serta masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan untuk memberikan masukan kepada kami yang menjadi kebutuhan dari kelompok sasaran itu sendiri. Dari diskusi tersebut kita mendapatkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi namun tidak sesuai anggaran yang kami ajukan, sehingga kedepan tentu akan ditambah jumlah anggaran dan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta agar seluruh keinginan dari kelompok sasaran dapat terpenuhi.” (Wawancara dengan IS 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses melibatkan kelompok sasaran yaitu wanita rawan sosial ekonomi telah dilakukan oleh pihak dinas sosial Kota Makassar, namun keterbatasan jumlah anggaran membuat tidak semua masukan dari masyarakat dapat dipenuhi oleh dinas sosial Kota Makassar.

Proses analisis keputusan membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Kriteria menunjukkan definisi masalah dalam bentuk yang konkrit dan kadang-kadang dianggap sebagai saran yang akan dicapai. Analisis atas kriteria penilaian dilakukan

untuk memperoleh seperangkat standar pengukuran, untuk kemudian dijadikan sebagai alat dalam membandingkan alternatif.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan program menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar kemudian di perhadapkan akan kebutuhan masyarakat yang benar-benar harus dimulai dari tahap pelatihan dan pemberian pengetahuan. Keinginan masyarakat yang bersifat pragmatis tanpa memiliki prospek jangka panjang menjadi sebuah problem yang harus di selesaikan oleh pemerintah.

“Tentu melibatkan masyarakat yang menjadi target pemberdayaan dalam merumuskan program akan menimbulkan banyak permasalahan yang membutuhkan solusi. Secara umum semua wilayah problemnya hampir sama, di Kecamatan Mamajang sendiri wanita rawan sosial ekonomi itu bervariasi. Ada yang hanya sekedar meminta bantuan uang, ada juga ingin di berikan modal usaha namun tidak mengetahui usaha apa yang ingin mereka rintis. Sehingga melalui pertemuan antara pemerintah dan kelompok sasaran tentu bisa di ambil kesimpulan untuk memunculkan solusi agar dijalankan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat ditarik kesimpulan keterlibatan kelompok sasaran dalam merumuskan program pemberdayaan pada dasarnya untuk menyatukan visi antara kemampuan pemerintah Kota Makassar dengan kebutuhan bersama oleh masyarakat.

Setiap kriteria harus menjawab satu pertanyaan penting mengenai seberapa baik suatu alternatif akan dapat memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Keputusan akhir mengharuskan pengambil keputusan untuk memperkirakan bagaimana perbandingan suatu alternatif dengan

alternatif yang lainnya dalam kondisi-kondisi yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Permasalahan yang begitu kompleks di tengah masyarakat mengharuskan pemerintah Kota Makassar memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mendorong program yang akan dilaksanakan dalam upaya melakukan pemberdayaan. Kebutuhan yang berbeda-beda itulah menuntut para pemangku kebijakan harus berfikir lebih kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

“Sebelum melakukan pemberdayaan Dinas Sosial memang harus melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat kemudian pemerintah yang akan menyimpulkan apakah semua tuntutan wanita rawan sosial ekonomi semuanya dapat di penuhi atau cukup ditarik satu solusi sebagai program bersama. Karena jika didorong program pelatihan kepada semua target sasaran itu akan menjadi problem dikemudian hari terlebih jumlah penerimaan kerja bagi kaum perempuan itu sangat minim di Makassar. Tentu mereka harus memaksimalkan program UMKM dan itu juga membutuhkan modal yang sangat besar. Pemerintah perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki terlebih dahulu untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.” (Wawancara dengan MT 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat ditarik kesimpulan dimana Dinas Sosial Kota Makassar dituntut lebih kreatif dalam menjawab segala persoalan wanita rawan sosial ekonomi yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Para pemangku kebijakan perlu memperhatikan sumber daya yang dimiliki sebelum mengimplementasikan program yang telah direncanakan.

Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya, hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik. Salah satunya melalui pelibatan

masyarakat dalam menyusun program-program yang akan dilakukan dalam program pemberdayaan.

Menyusun alternatif program dengan melibatkan masyarakat atau wanita rawan sosial ekonomi sebagai target dan sasaran program pemberdayaan dapat memberi masukan kepada pemerintah Kota Makassar dalam menyusun program. Keterlibatan masyarakat juga sebagai wadah agar pemerintah dapat mengetahui keterbatasan yang ada pada masyarakat.

“Melibatkan masyarakat dalam menyusun program sebagai sarana bagi masyarakat untuk membuka ruang diskusi dengan pemerintah terkait kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah. Saya sendiri sudah sangat sering terlibat dalam proses pemberian masukan tersebut namun belum ada yang terelisasi karena alasan anggaran dan tentu sebagai masyarakat saya memahami persoalan tersebut. Minimal pemerintah Kota Makassar sudah mempunyai niat baik dalam memberikan bantuan dan perhatian kepada kami, bantuan apapun itu akan kami terima di kondisi saat sekarang karena berdiskusi yang panjang tidak akan menghadirkan solusi justru menambah masalah. Yang terpenting itu tadi pemerintah mengetahui kondisi masyarakatnya yang benar-benar memerlukan bantuan.” (Wawancara dengan SM 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa melibatkan masyarakat dalam perumusan program untuk pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar menjadi landasan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Melalui komunikasi tersebut masyarakat dapat menyampaikan kondisinya agar pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi tahapan perencanaan alternative program dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dimana Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan kecamatan

melakukan diskusi dengan target dan sasaran pemberdayaan terkait kebutuhan yang harus segera dijawab oleh pemerintah agar beban dalam kehidupan dapat berkurang. Melalui keterlibatan kelompok sasaran tersebut di temukan berbagai persoalan, kemudian dari masukan kelompok sasaran tersebut menjadi landasan Dinas Sosial Kota Makassar menjalankan program sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan.

#### 4. Tahapan Pemformalisasi

Pada hakikatnya, kesejahteraan sosial dapat dituju dengan beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Agen pemberdayaan juga membantu gagasan masyarakat agar lebih tertata baik dan formal dalam bentuk tulisan sehingga masyarakat yang membutuhkan proposal dapat mengajukan proposal tersebut guna pencairan dananya kelak.

Pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar terlebih dahulu melalui kegiatan sosialisasi dengan menjadikan masyarakat penerima bantuan sebagai peserta. Melalui kegiatan tersebut disimpulkan apa yang menjadi gagasan dari masyarakat penerima bantuan.

“Terlebih dahulu kami melakukan sosialisasi dengan mengundang dua narasumber certa menghadirkan masyarakat yang sudah terdata sebagai peserta pemberdayaan. Melalui sosialisasi tersebut disampaikan metode pelaksanaan pemberdayaan, serta apa yang menjadi kendala masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita menyepakati bentuk kegiatan sesuai dengan keinginan masyarakat.” (Wawancara dengan LH 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan melalui sosialisasi pemerintah Kota Makassar menjelaskan kepada masyarakat

terkait tata cara pelaksanaan bantuan bagi perempuan yang terdaftar sebagai peserta pemberdayaan, sehingga informasi terkait bentuk kegiatan pemberdayaan dapat dipahami oleh masyarakat.

Seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, kebijakan, pelatihan, dan ritual merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam formalisasi. Berbagai teknik ini pada dasarnya bertujuan untuk membakukan jabatan dan pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kompleksitas organisasi juga sering kali merupakan tindakan untuk membuat organisasi dengan lebih banyak bagian yang bersifat baku sehingga juga meningkatkan formalisasi.

Proses pendataan peserta pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Makassar dilakukan pada setiap masing-masing kecamatan dengan berkoordinasi langsung kepada para agen pemberdayaan sebagai tim yang menindaklanjuti pelaksanaan program. Melalui koordinasi tersebut terdapatlah beberapa nama sebagai penerima bantuan.

“Pihak kecamatan menyerahkan beberapa nama kepada para agen pemberdayaan yang bertugas dilapangan untuk meninjau langsung nama-nama yang kami usulkan mendapatkan program pemberdayaan WRSE tersebut. Saya melihat pada tim lapangan tersebut benar-benar memprioritaskan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Setiap program memang seperti itu pelaksanaannya bertahap sehingga perlu proses penjaringan sesuai dengan syarat penerima bantuan yang sudah ditetapkan dinsos.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan dalam menetapkan masyarakat penerima bantuan WRSE dimana beberapa nama yang telah diajukan oleh pemerintah kecamatan kemudian dilakukan proses penjaringan

dengan memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan melalui kegiatan pemberdayaan tersebut.

Pemformalisasi menunjukkan tingkatan, di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi. Sentralisasi berkaitan erat dengan corak pembagian otoritas maupun rantai komando yang digunakan dalam sebuah organisasi.

Setiap program memiliki cara pelaksanaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Kota Makassar. Pentingnya landasan hukum untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pemberdayaan sehingga proses pemberdayaan WRSE di Kota Makassar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

“Program pemerintah itu memang harus memiliki regulasi yang jelas sebagai organisasi yang formal. Syarat administrasi sangatlah penting sebagai payung hukum bagi masyarakat nantinya yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan WRSE ini. Permasalahan yang banyak terjadi pada kegiatan pemberdayaan adalah pengklaiman oleh pihak-pihak tertentu jika masyarakat nanti telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keinginan mereka, seperti bagi masyarakat yang fokus kepada kegiatan usaha dinas sosial perlu menguruskan surat izin usaha sebagai sebuah syarat pelaksanaan kegiatan usaha di Kota Makassar. Selain itu bagi peserta WRSE ini jangan lagi dibebankan seperti perpajakan dengan label bahwa mereka masuk kategori pemberdayaan oleh pemerintah Kota Makassar.” (Wawancara dengan AN 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa formalisasi merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat penerima WRSE agar

dalam pelaksanaan usahanya mempunyai regulasi yang jelas sebagai penopang masyarakat jika nantinya terdapat sebuah masalah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Indikator pelaksanaan yang terdiri dari berbagai metode menjadikan rentetan yang sangat panjang dan cenderung membuat masyarakat kurang memahami mekanisme pelaksanaan.

Permasalahan yang di hadapi masyarakat melalui pemberian gagasan kepada pemerintah Kota Makassar dinilai terlalu rumit serta memakan waktu yang cukup lama. Dimana setiap masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan WRSE terlebih dahulu diikutkan dalam pelatihan yang hanya bersifat formalitas tanpa hasil yang jelas.

“Pelatihan yang dilakukan kebanyakan teori yang susah diterima oleh kami masyarakat. Saya berfikir ada semacam pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan kami tentang sesuatu. Ada yang mengusulkan membuka konfeksi tetapi tidak mempunyai modal namun tidak mendapatkan solusi dari pemerintah dengan alasan bahwa anggaran belum cukup untuk memfasilitasi semua keinginan masyarakat. Justru saya cenderung melihat bahwa kegiatan ini sama saja dengan bantuan pemberian sembako namun prosesnya sangat rumit.” (Wawancara dengan Bk 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan adanya ketidakpuasan masyarakat peserta WRSE dari kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Makassar. Penyampaian gagasan oleh masyarakat tidak mendapat respon baik oleh pemerintah sehingga cenderung pelaksanaan dinilai kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait tahapan pemformalisasi dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar terlebih dahulu dinas sosial melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pemberdayaan WRSE. Dalam sosialisasi tersebut masyarakat dijelaskan terkait pelaksanaan program dengan berbagai tahapan serta landasan hukum kegiatan. Program yang disepakati dalam kegiatan pemberdayaan kemudian dituangkan kedalam lokus yang akan didiskusikan bersama dengan stakeholder terkait. Dinas sosial Kota Makassar juga bertanggung jawab penuh secara aturan dan regulasi terkait pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar.

#### **5. Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di kota Makassar merupakan proses menentukan keberhasilan program dengan menyentuh beberapa kelompok perempuan yang bertindak sebagai kepala rumah tanggtela akibat dari tidak adanya laki-laki yang bertindak sebagai

kepala rumah tangga dalam keluarga tersebut dengan terlebih dahulu memberikan bantuan sembako kepada peserta pemberdayaan.

“Pelaksanaan merupakan faktor penentu keberhasilan program, dalam implementasi program terlebih dahulu pemerintah melalui petugas lapangan memberikan bantuan kepada WRSE di Kota Makassar dengan bentuk sembako serta uang tunai. Jadi kita belum masuk kepada tahap pemberian pelatihan, namun kegiatan yang telah dilakukan merupakan rangkaian dari pelaksanaan program pemberdayaan WRSE.” (Wawancara dengan IS 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa progress pelaksanaan kegiatan pemberdayaan telah berjalan dengan bentuk pemberian bantuan berupa sembako kepada WRSE dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Implementasi program peningkatan kesejahteraan WRSE di kecamatan Mamajang sudah sering dilakukan baik oleh dinas sosial Kota Makassar dengan berkoordinasi terhadap pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kelurahan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah memberikan bantuan terhadap pelaku usaha khususnya kaum perempuan yang bertindak sebagai kepala rumah tangga.

“Bentuk kegiatan yang sering dilakukan dalam rangka pemberdayaan kepada kelompok wanita rawan sosial ekonomi melalui pemberian

bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Bagi mereka yang tidak mempunyai usaha diberikan pelatihan agar dapat melihat potensi usaha yang bisa dilakukan dalam upayanya meningkatkan perekonomian masyarakat.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan usaha kepada kelompok WRSE yang memiliki usaha dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya bagi kelompok WRSE yang lain terlebih dahulu di berikan pelatihan agar dapat melihat potensi yang mampu dikembangkan dalam meningkatkan taraf perekonomian.

Pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pemerintah kota kadang tidak melaksanakan program sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Dimana kegiatan pemberdayaan yang mengarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat terkadang hanya sebagai formalitas dengan hanya memberikan bantuan berupa materi kepada masyarakat tanpa adanya bimbingan dan pendampingan.

“Ada banyak sebenarnya program pemberdayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah atau sektor swasta namun semua mengarah kepada pemberian bantuan tanpa adanya pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat. Peningkatan potensi masyarakat dalam melihat peluang usaha sebenarnya indikator utama dalam pemberdayaan tetapi kebanyakan pemberdayaan itu hanya memberikan uang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara.

Sehingga dari itu pelaksanaan benar-benar harus di kawal dengan baik.” (Wawancara dengan AN 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu mendapatkan pengawalan baik dari masyarakat dan LSM agar dapat berjalan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar walaupun berjalan tetapi tidak sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penyampaian kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan hanya sebatas sosialisasi tanpa adanya program pelatihan sesuai dengan hasil sharing antara masyarakat dan pelaksana pemberdayaan.

“Tidak ada bentuk pelatihan yang dilakukan, hanya sebatas bantuan sembako dan uang untuk meringankan beban hidup. Padahal harapan kami pelaksanaan benar-benar sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada kami. Waktu itu pihak pemerintah cuma mengatakan bahwa program ini belum dapat berjalan maksimal karena membutuhkan waktu termasuk penyediaan anggaran.” (Wawancara dengan JL 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar tidak berjalan seperti apa yang

telah di tetapkan. Kegiatan pemberdayaan hanya sebatas pemberian sembako dan bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait tahapan pelaksanaan dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar belum sepenuhnya berjalan maksimal. Kegiatan pemberdayaan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemberian bantuan sembako dan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tetap merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dari kelompok wanita WRSE di Kota Makassar, selanjutnya program tersebut tetap akan diarahkan sesuai dengan rencana program yang telah disusun.

#### **6. Tahapan Evaluasi**

Evaluasi berfungsi untuk melihat dampak, dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi. Pada pelaksanaannya evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih kompleks dari monitoring. Lalu untuk mendapatkan evaluasi yang baik diperlukan data baseline sebagai acuan dan melakukan perencanaan evaluasi sedari awalseperti menetapkan tujuan, metodologi, jadwal, dan pembiayaan.

Dalam mengukur keberhasilan suatu program dapat dilakukan melalui tahapan evaluasi. Penentuan program pemberdayaan WRSE dapat berlanjut atau tidak tergantung dalam bagaimana bentuk evaluasi. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial mengajak seluruh elemen memberi masukan terkait pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar agar dapat menjadi

bahan pertimbangan dari aparaturnya terkait dalam membangun program yang lebih baik.

“Proses evaluasi dilakukan pada saat setelah program dijalankan. Dari evaluasi tentu kami dapat melihat kendala yang terjadi dilapangan terkait pemberdayaan WRSE. Untuk program yang terbilang baru ini tidak banyak yang dapat dievaluasi. Mengingat program ini dapat memberikan efek peningkatan mutu perekonomian masyarakat maka kedepan kami akan menambah anggaran dalam pengembangan program. Karena anggaran yang ada tidak seberapa kebanyakan kami menggunakan danah hiba, sementara jumlah masyarakat yang masuk kategori WRSE di Kota Makassar belum dapat di data secara keseluruhan sehingga kami mengharapkan saran dan masukan dari seluruh masyarakat untuk membantu kami dalam mengupgrade program ini agar lebih baik kedepannya.” (Wawancara dengan LH 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam rangka proses evaluasi program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar masih membutuhkan beberapa perbaikan termasuk penambahan jumlah anggaran sehingga proses pelaksanaan pemberdayaan WRSE dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Melalui tahapan evaluasi aparaturnya terkait dapat mendapatkan masukan bagaimana capaian dari pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar. Salah satu kendala terbesar pelaksanaan WRSE di

karenakan pandemic Covid-19 yang membuat beberapa anggaran Kota Makassar lebih banyak dipergunakan dalam pencegahan pandemic tersebut.

“Dalam mengevaluasi sebuah kegiatan kita harus melihat apa masalah yang terjadi dilapangan. Saya melihat program tersebut sementara berjalan namun terkendala permasalahan Covid-19 dimana perhatian pemerintah sekerang tidak hanya kepada persoalan WRSE tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu kedepan saya fikir program ini perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan dan pendampingan agar arah program benar-benar dapat memberikan peningkatan perekonomian kepada masyarakat.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar adalah terjadinya pandemic Covid-19. Selanjutnya bagi masyarakat penerima program perlu dilakukan pendampingan dan bimbingan agar anggaran yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Selama ini masyarakat kebanyakan hanya mengharap bantuan kepada pemerintah tanpa adanya upaya dalam memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakat itu sendiri. Persoalan tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan mengubah pola-pola pemberdayaan terlebih mengenai WRSE yang membutuhkan penghidupan jangka panjang.

“Ketika kita melihat bentuk formulasi program yang dicanangkan oleh pemerintah semua serba bagus dan optimis dapat sukses pada wilayah

pelaksanaannya. Saya mempelajari program WRSE ini juga sama dengan program-program pemberdayaan yang lainnya hanya saja sasaran yang berbeda. Kalau saya kenapa tidak membuka perusahaan daerah atau bekerja sama dengan sektor swasta kemudian mempekerjakan wanita rawan sosial ekonomi tersebut. Tentu itu akan lebih efektif dan menghemat anggaran pemerintah.” (Wawancara dengan MT 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pola pemberdayaan WRSE masih menggunakan metode yang lama atau sama seperti pada program-program sebelumnya. Hal tersebut dianggap kurang optimal dalam memberikan peningkatan perekonomian masyarakat.

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Dalam evaluasi target dan sasaran dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar cenderung tidak efektif dan bertolak belakang dari apa yang telah direncanakan. Dimana dalam pelaksanaan program tidak ada bentuk pelatihan dan pendampingan seperti apa yang di katakana dalam sosialisasi terhadap masyarakat yang terlibat sebagai peserta.

“Jika disuruh menilai terkait bagaimana pelaksanaan program WRSE ini, itu masih jauh dari harapan. Tidak ada bentukan program seperti pelatihan dan pendampingan seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pada saat sosialisasi. Kami hanya diminta menunggu sampai kegiatan seperti yang dijanjikan pemerintah benar-benar berjalan sesuai yang ditetapkan.” (Wawancara dengan SM 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan program WRSE di kota Makassar belum berjalan sesuai dengan hasil sosialisasi pemerintah Kota. Masyarakat kemudian diminta untuk bersabar agar program benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait tahapan evaluasi dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar terlihat belum berjalan maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa persoalan seperti situasi pandemi, kekurangan anggaran, serta banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Evaluasi ini menjadi proses penilaian apa kekurangan dari pelaksanaan program, sehingga menjadi acuan dalam peningkatan program yang dilakukan selanjutnya.

#### **7. Tahapan Terminasi**

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Ketika masyarakat dianggap telah berdaya secara ekonomi maka pemerintah akan memberhentikan kegiatan pemberdayaan atau berpindah dengan sasaran yang lain.

Setiap masyarakat yang terdaftar dalam program pemberdayaan WRSE akan di lepas untuk kemudian mengelola usaha secara mandiri jika telah dilakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan yang menjadi

keinginan dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut merupakan cara agar masyarakat lebih berdaya dan tidak terus bergantung terhadap pemerintah.

“Dari beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan jika dianggap sasaran sudah mampu mandiri tentu program tidak akan dilanjutkan. Kedepan WRSEpun demikian bagi masyarakat yang telah menjalankan kegiatan usahanya setelah mendapat bimbingan dan pendampingan dari aparatur yang bertugas dilapangan maka akan diberikan kebebasan dalam mengelola usaha yang diinginkan agar masyarakat benar-benar bisa berdaya tanpa perlu terus berharap terhadap orang lain.” (Wawancara dengan IS 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kedepan setelah program pemberdayaan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada peserta wanita rawan sosial ekonomi maka pemerintah akan membiarkan para peserta WRSE tersebut mengelola kegiatan usahanya secara mandiri.

Tujuan dari pemberdayaan biasanya dapat memperkuat kekuasaan masyarakat yang memiliki kondisi tidak mampu dalam ekonomi, keterampilan serta dalam hal pendidikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah itu akan ada program baru yang berkesinambungan dengan program sebelumnya seperti kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang harus selalu terpenuhi.

Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar pada dasarnya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan kepada wanita yang bertindak sebagai kepala keluarga yang menjadi harapan dari keluarga, sehingga membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah. Walau program pemberdayaan telah dilaksanakan namun pemerintah tetap harus memberikan perhatian melalui bentuk program yang lainnya.

“Ada banyak perempuan disekitar kita yang memiliki peran ganda, selain sebagai ibu juga bertindak sebagai kepala keluarga. Melalui program WRSE tentu kita harapkan bersama dapat memberi peningkatan perekonomian terhadap mereka. Setelah program pemberdayaan WRSE ini telah dijalankan, pemerintah masih memiliki tanggung jawab agar memperhatikan mereka.” (Wawancara dengan FW 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan pasca program pemberdayaan WRSE dilaksanakan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan perhatian terhadap wanita yang menjadi tulang punggung dari keluarga. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa target dan sasaran sudah benar-benar berdaya secara ekonomi.

Setiap masyarakat ada kekuatan terstruktur yang bekerja untuk mengadakan perubahan dan ada pula yang mengusahakan stabilitas. Keduanya diperlukan untuk kelangsungan masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan hadir untuk memastikan kedua aspek tersebut dapat terwujud. Sehingga masyarakat tidak terus bergantung dan mengharapkan bantuan terhadap pemerintah.

Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan potensi yang dimiliki untuk mengelola sumber daya yang ada pada prospek peningkatan kesejahteraan tidak hanya berhenti dalam kegiatan pemberdayaan. Walau pada dasarnya masyarakat harus mandiri tanpa bergantung terhadap pemerintah tetapi pada kelompok wanita tentu harus mempunyai pengecualian terlebih dalam struktur sosial masyarakat wanita selalu mendapat diskriminasi.

“Bagi saya pada pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar setelah selesai program pemberdayaan dilakukan oleh dinas sosial

tentu masih perlu dilakukan pendampingan, karena ini berkaitan dengan hak-hak kelompok perempuan yang sering mendapat perlakuan tidak adil dalam lingkungannya. Perlu ada kerjasama antara dinas sosial, perlindungan perempuan, tokoh masyarakat, serta ibu PKK yang ada di setiap Kecamatan. Jadi tidak berhenti pada tahapan pemberdayaan karena bagaimanapun juga perempuan harus diakui mempunyai keterbatasan terlebih di Kota Makassar dimana kita ketahui bersama persaingan usaha begitu ketat.” (Wawancara dengan MT 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa setelah proses pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar telah dilaksanakan, namun perlindungan terhadap kelompok WRSE tersebut tetap harus mendapat perhatian pemerintah yang berwenang, agar tidak terjadi intimidasi dan diskriminasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Ketika pemerintah telah mewujudkannya melalui kegiatan pemberdayaan, selanjutnya pemerintah akan membuat program untuk memecahkan masalah yang lainnya.

Kegiatan pemberdayaan dikatakan terlaksana dengan baik jika sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu dan proses yang panjang termasuk pada wilayah pembinaan WRSE di Kota Makassar. Setelah pemberian bantuan usaha dar. permodalan namun masyarakat masih tetap membutuhkan pemerintah pada proses pendampingan.

“Jika apa yang menjadi tujuan pemerintah telah tercapai dalam pelaksanaan program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar sebagai masyarakat tentu kami tetap membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Apa lagi pada situasi seperti sekarang ini, yang

terpenting apa yang menjadi tujuan pemerintah tidak hanya sekedar terlaksana tapi benar-benar memberikan manfaat kepada kami.” (Wawancara dengan SH 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar tidak benar-benar berhenti ketika program telah dijalankan, namun masyarakat masih membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan pada tahapan terminasi dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar pemerintah akan menghentikan proyek pemberdayaan jika target dan sasaran benar-benar telah berdaya secara ekonomi. Namun tetap akan melaksanakan proses pendampingan dan perlindungan kepada kelompok WRSE yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan masyarakat.

### **C. Faktor Yang Melatarbelakangi Program Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Makassar**

Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan sosial. Kondisi perempuan rawan ekonomi mengalami ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan keluarga dan bermasyarakat, maka perlu ada pemberdayaan bagi mereka.

Program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang

melatarbelakangi berjalannya program tersebut, yang kemudian penulis uraikan dalam hasil pembahasan sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung**

Kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar melalui program peningkatan kesejahteraan lorong dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan edukasi berupa keterampilan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mendukung program yaitu:

#### **a. Motivasi**

Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak pemerintah bila menginginkan setiap program pemberdayaan dapat memberikan andil positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan, karena dengan motivasi seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Persoalan kemiskinan di kota-kota besar seperti Makassar merupakan permasalahan yang tidak pernah selesai untuk dibicarakan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan termasuk melalui pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut menjadi faktor yang mendorong pemerintah Kota Makassar melakukan kegiatan pemberdayaan.

“Sebagai aparatur birokrasi yang memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu kami mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan sebuah kondisi agar semua masyarakat bisa berdaya. Salah satu kelompok yang sangat rentan

dalam kemiskinan adalah kelompok wanita yang bertindak sebagai kepala keluarga namun tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Tentu hal tersebut menjadi masalah, mereka tidak mungkin berdaya tanpa dorongan pemerintah, sehingga tercetusnya program ini di harapkan dapat menjadi titik balik bagi kelompok wanita tersebut dapat merasakan kehidupan yang lebih baik.” (Wawancara dengan IS 01 Februari 2021)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memecahkan permasalahan sosial termasuk didalamnya kemiskinan. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah mendorong program-program inovasi yang berkaitan dengan wilayah pemberdayaan guna memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi kerja dapat memacu pemerintah untuk bekerja keras sehingga dapat meningkatkan produktifitas pelayanan dan akan berpengaruh pada pencapaian tujuan pemberdayaan.

Motivasi dapat menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar. Pemerintah yang memiliki motivasi tinggi adalah birokrasi yang senantiasa membuat program yang mengarah kepada pelayanan terhadap masyarakat umum termasuk mengurangi kemiskinan.

“Melalui beberapa program yang didorong oleh pemerintah Kota Makassar yang terbilang baru dan mempunyai nama-nama yang sangat unik menunjukkan bahwa pemkot Makassar selalu berupaya untuk menciptakan terobosan melalui pembentukan program-program yang mampu mengarahkan kepada pengurangan kemiskinan. Seperti program WRSE ini, terciptanya program ini tidak terlepas dari bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok perempuan yang bertindak

sebagai kepala keluarga namun tidak berdaya secara ekonomi.” (Wawancara dengan HK 04 Februari 2021),

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar merupakan bentuk untuk mengukur motivasi dari pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan.

b. Kerjasama

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang paling utama. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena adanya kesamaan tujuan yang akan dicapai.

Program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dapat berjalan dengan adanya kerjasama dari semua pihak. Kegiatan pemberdayaan tidak akan efektif tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung program tersebut. Keterlibatan masyarakat sebagai sasaran menjadi acuan pelaksanaan sebuah program.

“Upaya dari pemkot Makassar dalam mengurangi angka kemiskinan tentu perlu didukung oleh semua stakeholder termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat mendukung pemerintah dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta untuk proses register. Selain itu masyarakat mudah dikoordinir, dengan kerjasama tersebut dapat memberikan kemudahan terlaksananya program.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dapat terlaksana atas kerjasama dari masyarakat

sebagai sasaran dalam mengikuti semua tahapan pada pelaksanaan program wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar.

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Program pemberdayaan tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari sesama instansi pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri sebagai sasaran pemberdayaan. Kerjasama dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan program WRSE di kota Makassar mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Dinas Sosial selalu melibatkan semua pihak untuk memberikan masukan dan saran dalam perbaikan program.

“Keseriusan pemerintah Kota Makassar terlihat dari dalam perumusan program selalu meminta pandangan dari berbagai elemen untuk sharing informasi terkait bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Masukan tersebut menjadi acuan untuk pelaksanaan program. Dibeberapa kesempatan kami juga selalu diundang untuk memberikan masukan termasuk untuk mengkaji sebuah rencana sebelum di realisasikan kepada masyarakat.” (Wawancara dengan AN 03 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka perumusan program pemkot Makassar senantiasa melibatkan stakeholder terkait dalam memberikan saran dan masukan. Langkah tersebut merupakan bentuk kerjasama dalam proses mendukung pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan ada dua indikator yang mendukung pelaksanaan program WRSE di Kota Makassar yaitu motivasi dan kerjasama. Motivasi disini merupakan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Tekad pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan menjadi motivasi pelaksanaan program. Selanjutnya kerjasama dengan melibatkan beberapa unsur dalam memberikan saran serta masukan mulai pada proses perencanaan sampai kepada tahap evaluasi sehingga program dapat terus berjalan dan ditingkatkan.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan program pemerintah terkadang menemui beberapa masalah. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengantisipasi dengan merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Beberapa kendala yang membuat tidak optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar kemudian akan dibahas dalam hasil penelitian berikut ini:

### **a. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan

anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat.

-- Segala bentuk kegiatan pemerintah termasuk pelaksanaan pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya anggaran yang cukup dalam memenuhi semua tahapan pelaksanaan program. Pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar cenderung terlaksana namun kurang optimal dikarenakan minimnya anggaran yang direalisasikan dalam program tersebut.

“Setiap kegiatan pemerintah pasti membutuhkan yang namanya anggaran, termasuk pelaksanaan pemberdayaan WRSE ini. Ditahun pertamanya program ini berjalan kami belum memikirkan bentuk kerjasama dengan sektor-sektor tertentu semua bertumpuh kepada anggaran pemerintah kota. Dengan melihat kondisi dilapangan, anggaran yang tersedia sangat kurang untuk proses tahapan pelaksanaan program pemberdayaan.” (Wawancara dengan LH 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya keterbatasan anggaran menyebabkan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar berjalan kurang optimal. Terkait hal tersebut pemerintah tidak menyebutkan jumlah rincian anggaran yang digunakan, hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar belum mewujudkan transparansi sebagai landasan *good governance* yang dimana mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, penegakan hukum, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) wawasan kedepan, dan daya tanggap. Walau program tersebut menggunakan anggaran dari APBD Kota Makassar.

Anggaran digunakan oleh pemerintah tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu. Kekurangan anggaran akan membuat program berjalan tidak optimal. Untuk itu pemerintah perlu melakukan evaluasi dalam sebuah program pemberdayaan agar menyediakan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan target sasaran.

Pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan menggali potensi yang ada pada masyarakat selanjutnya dikelola sebagai sebuah komoditi dalam memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Kegiatan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar juga menetapkan langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat namun karena keterbatasan anggaran kegiatan pemberdayaan menjadi tidak efektif.

“Pada saat sosialisasi pemerintah mengatakan akan memberikan pelatihan-pelatihan usaha kepada masyarakat. Namun nyatanya tidak ada pelatihan seperti yang diharapkan hanya pemberian uang dan sembako saja. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya anggaran yang tersedia dalam menopang semua kebutuhan kelompok sasaran sehingga akan diperbaiki untuk pelaksanaan kedepannya.” (Wawancara dengan SM 04 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan WRSE tidak berjalan sesuai dengan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok sasaran. Banyak kegiatan-kegiatan untuk mendukung program pemberdayaan tidak berjalan akibat dari minimnya anggaran untuk mendukung program WRSE tersebut.

b. Pandemi Covid-19

Dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari. Berbagai kebijakan pemerintah dibuat dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung.

Berbagai regulasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam rangka memutus penyebaran pandemic Covid-19 termasuk pembatasan sosial berskala besar yang membuat beberapa kegiatan perekonomian masyarakat menjadi lumpuh. Persoalan tersebut membuat pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada kelompok kecil saja namun seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar.

“Ada banyak program yang tidak terealisasi selama satu tahun ini akibat dari Covid-19. Salah satu juga pelaksanaan pemberdayaan WRSE tidak optimal karena persoalan tersebut. Pemerintah mulai dari pusat sampai kelurahan berfokus untuk memutus penyebaran Covid-19. Tentu ini menjadi penghambat karena kita semua harus memprioritaskan persoalan Covid.” (Wawancara dengan FW 01 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar menjadi tidak optimal akibat seluruh elemen pemerintah fokus kepada pengendalian penyebaran Covid -19 di Kota Makassar.

Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peran masyarakat sesuai dengan Undang-undang adalah, untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang diatur dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa, masyarakat seharusnya disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik.

Selain membuat perekonomian masyarakat lumpuh kondisi pasca munculnya Covid-19 membuat masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan tidak banyak berkegiatan diluar rumah bahkan beberapa instansi pemerintahan pelayanan publik tidak lagi bekerja seperti biasa dalam memberikan pelayanan.

“Fenomena pandemi Covid-19 memang membuat kegiatan pemerintahan menjadi lumpuh total. Segala bentuk kegiatan yang sifatnya memerlukan interaksi langsung itu untuk sementara ditiadakan. Tentu masalah tersebut berdampak kepada kegiatan pemberdayaan, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal.” (Wawancara dengan MT 02 Februari 2021).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa persoalan Covid-19 menjadi penghambat kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Proses pemberdayaan yang memerlukan

interaksi langsung sangat bertolak belakang dengan visi pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19 di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar terdapat dua masalah yaitu keterbatasan anggaran dan pandemi Covid 19. Kebutuhan dalam melaksanakan program pemberdayaan WRSE tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia dari APBD Kota Makassar, sehingga beberapa kegiatan yang telah di rencanakan termasuk proses pelatihan tidak dapat dilakukan. Kemudian permasalahan Covid-19 yang melanda dunia juga memiliki dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Dimana aturan penerapan protokol kesehatan tidak memungkinkan pelaksanaan pemberdayaan, sehingga pemerintah Kota Makassar perlu memikirkan opsi baru dalam menjalan setiap program yang belum dilaksanakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial Kota Makassar maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, pada tahap ini Dinas Sosial Kota Makassar berfokus mencari dan membentuk tenaga lapangan yang akan berfungsi sebagai pelaksana program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar.
2. Tahap pengkajian, pemerintah Kota Makassar melalui dinas sosial mengambil data lapangan terkait jumlah masyarakat yang masuk kategori WRSE dan merumuskan program penanganan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut.
3. Tahap perencanaan alternative program, dengan melibatkan pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan dan juga lembaga swadaya masyarakat melakukan diskusi terkait langkah dalam membentuk program terhadap kelompok wanita rawan sosial di Kota Makassar.
4. Tahapan pemformalisasi dimana sebagai program turunan dari pembinaan lorong kegiatan pemberdayaan WRSE di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan pemerintah kota Perwali No 10 Tahun 2015 tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.
5. Tahapan pelaksanaan, dimana dalam implementasi program WRSE di Kota Makassar belum berjalan maksimal karena berbagai alasan

seperti kurangnya anggaran, data WRSE yang belum lengkap dan masalah pandemic Covid-19.

6. Tahapan evaluasi, pada tahap ini menegaskan bahwa program WRSE di Kota Makassar belum terlaksana sesuai dengan rancangan program karena berbagai kendala. Dinas Sosial akan memperbaiki kekurangan termasuk dalam penambahan jumlah anggaran program.
7. Tahapan terminasi. Dinas Sosial kota Makassar dalam pelaksanaan pemberdayaan WRSE belum sampai pada tahap ini, kegiatan pemberdayaan akan berakhir namun program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus berlanjut dengan bentuk program yang berbeda namun tetap berkesinambungan.
8. Faktor pendukung, program pemberdayaan WRSE di Kota Makassar walau terkesan pelaksanaannya terlalu terburu-buru namun tetap berjalan karena faktor motivasi pemerintah yang mendorong pengurangan angka kemiskinan di Kota Makassar dan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti pemerintah kelurahan, Kecamatan, lembaga swadaya masyarakat dan target atau sasaran program.
9. Faktor penghambat kurangnya anggaran pelaksanaan WRSE di Kota Makassar menjadi salah satu alasan tidak maksimalnya pelaksanaan program di tambah kondisi pandemic Covid-19 membuat pelaksanaan untuk sementara di hentikan karena semua instansi pemerintahan fokus terhadap program pengendalian penyebaran Covid-19.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tahapan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial Kota Makassar maka penulis mengajukan saran berdasarkan hasil observasi dilapangan yaitu:

1. Dalam mengikuti program pemberdayaan wanita rawan sosial di Kota Makassar, masyarakat sebagai sasaran yang terdaftar dalam program seharusnya mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar benar-benar memahami prosedur pelaksanaan kegiatan.
2. Dinas Sosial kota Makassar sebagai pelaksana program benar-benar harus melaksanakan semua tahapan program dengan baik termasuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program pemberdayaan WRSE yang optimal.
3. Sebaiknya program wanita rawan sosial ekonomi di Kota Makassar dilakukan dengan membentuk kelompok usaha bersama agar lebih mudah dikoordinir dan tidak memakan anggaran yang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adisaputro, G. (2010). *Anggaran Perusahaan* (U. BPFE & G. Mada (eds.)).
- Agustinah, F. (2017). Peran Koperasi Wanita (Kopwan) Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Mojokerto. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.238>
- Asnawi. (2012). *Teori motivasi*. Studio Pres.
- Azizah, R. N., Zauhar, S., & Soeaidy, M. S. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*.
- Baidowi, A. (2011). *Memandang Perempuan* (Marja (ed.)).
- Barnawi, A. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Haqqie, S. N. Y. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan (Studi Kasus Kegiatan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Blagung, Boyolali). In *Ilmu Pendidikan*.
- Haris, A. W. (2010). Kesejahteraan sosial dan pembangunan komuniti: Pendekatan dan indikator. *Seminar Serantau Islam Dan Kesejahteraan Sejagat*.
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. In *Intrans Publishing*.
- Hubies, A. V. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press.
- Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Al-Bayan*.
- Ilham, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat – Pengertian, Prinsip, Tujuan Dan Tahapan*. Materibelajar.Co.Id.
- Indrajit, S. dan W. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Intrans Publishing.
- Karman. (2015). *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran* (Sebuah

Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*.

Lodjo, F. S. (2013). Pengaruh Pelatihan, Pemberdayaan Dan Efikasi Diri Terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1882>

Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. *Thesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota UNDIP, Semarang*.

Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Samudra Biru.

Purnama, A. (2019). Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.

Putri, O. N., & Darwis, R. S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13538>

Rahardjo, A. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Penerbit Graha ilmu.

Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan. *Socius*.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Sarah, N. N., & Waluyo, W. (2020). Pengaruh Penerapan Pola Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4tk) Bisnis & Pariwisata Jakarta. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*. <https://doi.org/10.32493/skr.v7i2.7033>

Subiyanto, B. S. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *E-Magazine Warta BP2SDM*.

Suradi. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial (Economic Growth And Sosial Welfare). *Informasi*.

Taliziduhu, N. (2007). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* (Y. Karya (ed.)).

Triono. (2011). Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances. *Jurnal Tapis*.

Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>

Yustika, A. S. dan. (2007). *Perspektif Baru Pembangunan di Indonesia*. PT. Danar Wijaya.

